

PENGARUH PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Disusun oleh : Tim Jogja, Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta

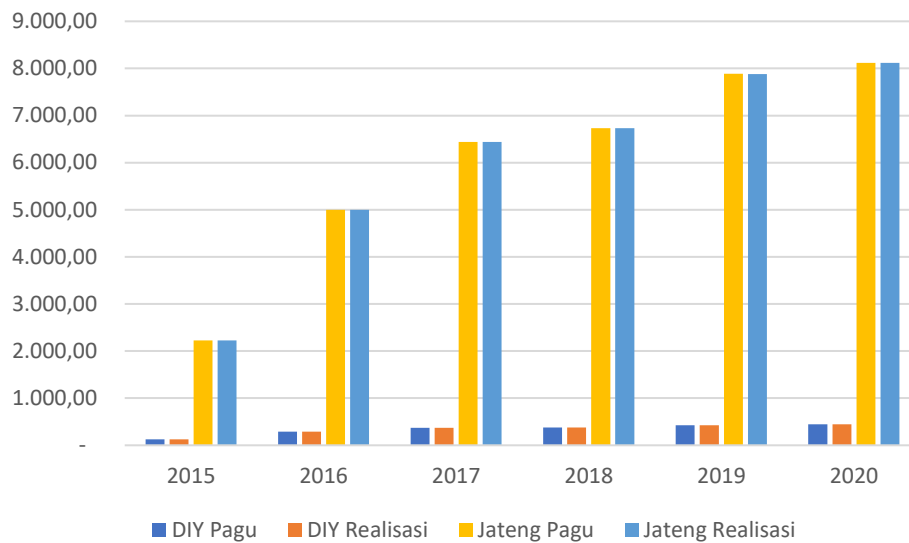
A. LATAR BELAKANG

Mulai tahun 2015, Pemerintah mulai mengucurkan dana desa sesuai amanat Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014. Program Dana Desa ini juga sejalan dengan salah satu program nawa cita Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, itulah program unggulan presiden. Tujuan pemberian yaitu meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Namun demikian, masih terdapat pertanyaan mengenai efektivitas Dana Desa dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini terutama apabila dilihat dari lebih banyaknya penduduk miskin di desa dibandingkan di perkotaan (kompas, 19 Juli 2018). Selain itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara, menyebutkan bahwa disparitas jumlah penduduk miskin di pedesaan dan perkotaan salah satunya juga disebabkan jumlah penduduk di suatu daerah yang berbeda, menyebabkan perhitungan penduduk miskin juga beragam. Misalnya saja, Papua yang jumlah penduduknya sedikit tetapi tingkat kemiskinannya tinggi dan Jawa yang jumlah penduduknya relatif banyak namun tingkat kemiskinannya rendah (kompas, 19 Juli 2018).

Untuk menjamin kesejahteraan penduduk desa, anggaran Dana Desa yang diberikan kepada Desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata sebesar Rp280 juta untuk setiap desa. Anggaran ini meningkat di tahun 2016 menjadi Rp46,8 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp628 juta. Peningkatan anggaran kembali terjadi pada tahun 2017 menjadi Rp60 triliun sehingga rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp800 juta. Jumlah yang sama kembali diberikan kepada desa pada tahun 2018 dengan perubahan formula pembagian dana desa. Perubahan formula tersebut didasarkan evaluasi pada tahun 2017 yang menyatakan belum optimalnya pemberian dana desa untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin dan jumlah desa tertinggal (detik.com, 18 Okt 2017). Reformulasi tersebut mengakibatkan Dana Desa yang diterima oleh Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi akan mengalami peningkatan, begitu pula untuk desa yang berada di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan. Perubahan kebijakan ini bertujuan untuk dapat menurunkan rasio ketimpangan distribusi dana desa.

Grafik 1

Alokasi dan realisasi Dana Desa tahun 2015 s.d. 2020



Selain penyempurnaan formula perhitungan Dana Desa yang diberikan untuk setiap desa, pada tahun 2018 diperkenalkan pula mekanisme Padat Karya Tunai (*Cash For Work*). Padat Karya Tunai di desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting. Skema padat karya tunai merupakan salah satu bentuk kegiatan padat karya yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat secara harian maupun mingguan dalam rangka memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan dana desa untuk upah tenaga kerja masyarakat dalam pembangunan desa wajib dialokasikan paling sedikit 30 persen.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 78, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Tingkat keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dalam suatu daerah dapat pula dilihat pada Indeks Pembangunan Manusia. Todaro dan Smith (2011) mendefinisikan IPM sebagai indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara yang mengkombinasikan pencapaian dibidang Pendidikan, Kesehatan dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan.

Pengaruh Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah banyak dikaji dengan kesimpulan yang sejalan. Sigit & Kosasih (2020) dengan penelitian pada tingkat kabupaten di Indonesia berdasarkan data tahun 2015 s.d. 2017 menyimpulkan bahwa Dana Desa mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Penelitian tersebut juga tidak berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sunu & Utama (2019) yang melakukan penelitian di Provinsi Bali berdasarkan data tahun 2015 s.d. 2017. Sementara itu, pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya terbatas pada tingkat kemiskinan, namun dapat pula menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kajian ini telah dilakukan oleh Manggala (2019) dengan menggunakan objek penelitian di provinsi Jawa Barat dengan menggunakan data tahun 2017 dan 2018 dan Simangunson,dkk (2021) yang melakukan penelitian di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menggunakan data tahun 2010 s.d. 2019. Kedua penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Dana Desa berpengaruh positif terhadap IPM.

Penelitian-penelitian tersebut menggunakan data nilai Dana Desa yang disalurkan kepada masing-masing kabupaten namun tanpa melihat bagaimana Dana Desa tersebut dipergunakan padahal pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah, dalam hal ini pemerintahan desa. Penggunaan dana desa harus mengikuti prioritas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi setiap tahun. Pada dasarnya, Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, penembangan dan pemeliharaan terhadap sarana prasarana desa, saran prasarana sosial pelayanan dasar, sarana prasarana usaha ekonomi desa, sarana prasarana pelestarian lingkungan hidup serta sarana prasaran lainnya. Namun demikian, dalam penetapan priroritas penggunaan dana desa perlu diperhatikan prinsip-prinsip penggunaan dana desa yaitu keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola berbasis sumber daya Desa dan tipologi desa. Kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa tersebut dikelompokkan ke dalam 5 Bidang yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini mengemukakan pertanyaan yaitu apakah realisasi penggunaan Dana Desa berpengaruh terhadap IPM di

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah? Kedua, kegiatan di Bidang mana yang mempunyai pengaruh paling besar dalam peningkatan IPM?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh realisasi Dana Desa berdasarkan pengelompokan Bidang yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa terhadap pembentukan IPM.

B. LANDASAN TEORI

1. Dana Desa

Penyaluran Dana Desa merupakan amanat Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 72 dimana Pendapatan Desa salah satunya bersumber pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 tahun 2021, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengalokasian Dana Desa kepada setiap desa ditetapkan melalui formulasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 tahun 2021, Dana Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja dan Alokasi Formula. Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 65 persen dari anggaran Dana Desa secara proporsional dibagi kepada setiap Desa berdasarkan kluster jumlah penduduk. Sementara itu, pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 1 persen dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Alokasi Kinerja dihitung sebesar 4 persen dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik. Desa dengan kinerja terbaik dipilih secara proporsional berdasarkan jumlah desa pada setiap kabupaten/kota. Dalam pemilihan desa dengan kinerja terbaik terdapat kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utama yaitu bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi, Desa berstatus berkembang, maju atau mandiri dan Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2020. Sementara itu, kriteria kinerja terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan dengan penjelasan indikator wajib terdiri dari 4 indikator yaitu pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20%, pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20 persen, capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25 persen dan capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35 persen. Sementara Indikator tambahan dikelompokkan ke dalam 4 kategori yaitu pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa dan capaian hasil

pembangunan desa. Alokasi yang terakhir yaitu Alokasi Formula yang dihitung sebesar 30 persen dari anggaran Dana Desa yang dibagi berdasarkan indikator jumlah penduduk dengan bobot 10 persen, angka kemiskinan desa dengan bobot 40 persen, luas wilayah dengan bobot 10 persen dan tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40 persen.

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dan dilakukan dalam 3 tahap dengan ketentuan tahap I sebesar 40 persen yang dapat dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni, tahap II sebesar 40 persen yang dapat dilakukan paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus dan tahap III sebesar 20 persen yang dapat dilakukan paling cepat bulan Juni. Penyaluran ini akan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setelah dokumen persyaratan diterima secara lengkap.

Penggunaan Dana Desa mengikuti pedoman yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan setiap tahunnya. Prioritas penggunaan Dana Desa tersebut dikelompokkan ke dalam 5 Bidang yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

2. Indeks Pembangunan Manusia

Pengukuran pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh *United Nation Development Program* (UNDP) pada tahun 1990. *United Nation Development Program* (UNDP) memperkenalkan sebuah gagasan baru dalam pengukuran pembangunan manusia yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejak saat itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report*(HDR). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. (UNDP, 1990).

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi dasar tersebut mencakup :

1. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran.

2. Pengetahuan yang dapat diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa dan kombinasi antara pendidikan dasar dan menengah.

3. Standar kehidupan yang layak diukur dengan Produk Domestik Bruto perkapita. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Pada laporan pertamanya, *United Nation Development Program (UNDP)* mengukur dimensi kesehatan dengan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan angka melek huruf. Adapun untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita (UNDP, 1990). Berdasarkan kajian mengenai indeks pembangunan manusia menurut UNDP, untuk mengetahui capaian indeks pembangunan manusia antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan ke dalam beberapa kategori, yaitu :

Tinggi	: IPM lebih dari 80,0
Menengah Atas	: IPM antara 66,0-79,0
Menengah Bawah	: IPM antara 50,0-59,0
Rendah	: IPM kurang dari 50

Manfaat penting dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara lain:

- a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk);
- b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Di Indonesia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan data strategis, karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan peningkatan dalam kemampuan dari produksi barang dan jasa dalam suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Pengukuran pertumbuhan ekonomi menggunakan perbandingan Produk Domestik Regional Bruto antara tahun ini dengan tahun yang lalu.

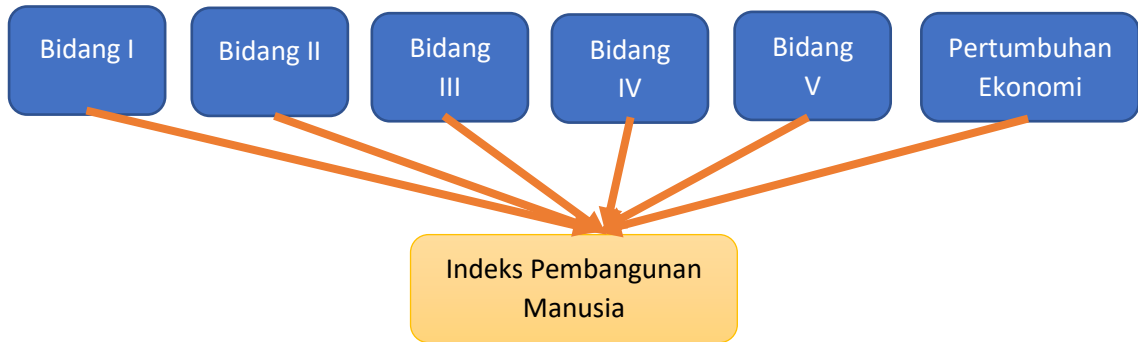
4. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pengaruh Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Kajian ini telah dilakukan oleh Manggala (2019) dengan menggunakan objek penelitian di provinsi Jawa Barat dengan menggunakan data tahun 2017 dan 2018 dan Simangunson (2021) yang melakukan penelitian di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menggunakan data

tahun 2010 s.d. 2019. Kedua penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Dana Desa berpengaruh positif terhadap IPM. Dalam penelitian ini, Manggala (2019) menggunakan variable Dana Desa dan PDRB, begitu pula Simangunson (2021) juga menggunakan variable Dana Desa dan PDRB.

5. Kerangka Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan tujuan penelitian secara skematis kerangka penelitian dapat dilihat pada gambar berikut:



Bidang I : Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang II : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang III : Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Bidang IV : Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang V : Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

6. Hipotesis Penelitian

Kajian ini dilakukan dengan pengembangan hipotesis secara umum diduga Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan hipotesis secara parsialnya sebagai berikut:

H1 : Diduga Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berpengaruh positif terhadap IPM

H2 : Diduga Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berpengaruh positif terhadap IPM

H3 : Diduga Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa berpengaruh positif terhadap IPM

H4 : Diduga Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berpengaruh positif terhadap IPM

H5 : Diduga Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa berpengaruh positif terhadap IPM

H6 : Diduga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder yang berguna untuk pengembangan model matematis dan pengujian hipotesis sehingga dapat diperoleh kesimpulan penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah realisasi penggunaan Dana Desa yang dikelompokkan sesuai dengan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa dari tahun 2018 s.d. 2021. Data ini diperoleh dari aplikasi OmSPAN yang merupakan sebuah aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Perbendaharaan. Sementara itu, data pertumbuhan ekonomi dan IPM diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

3. Model Penelitian

Variabel bebas yang digunakan dalam kajian ini yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, dan Pertumbuhan Ekonomi sedangkan variabel terikat adalah Indeks Pembangunan Manusia dengan model persamaan sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \alpha + \beta_1 Bidang I_{it} + \beta_2 Bidang II_{it} + \beta_3 Bidang III_{it} + \beta_4 Bidang IV_{it} + \beta_5 Bidang V_{it} + \beta_6 Growth_{it}$$

Dengan penjelasan:

IPM_{it} : Indeks Pembangunan Manusia

α : Intersep

β_k : Koefisien Regresi

$Bidang I_{it}$: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

$Bidang II_{it}$: Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

$Bidang III_{it}$: Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

$Bidang IV_{it}$: Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang V_it : Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak
Desa

Growth_it : Pertumbuhan Ekonomi

4. Definisi Operasional Variabel

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah realisasi penggunaan Dana Desa yang merupakan kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa adalah realisasi penggunaan Dana Desa yang merupakan kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa adalah realisasi penggunaan Dana Desa yang merupakan kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah realisasi penggunaan Dana Desa yang merupakan kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa adalah realisasi penggunaan Dana Desa yang merupakan kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari produksi barang dan jasa dalam suatu daerah.

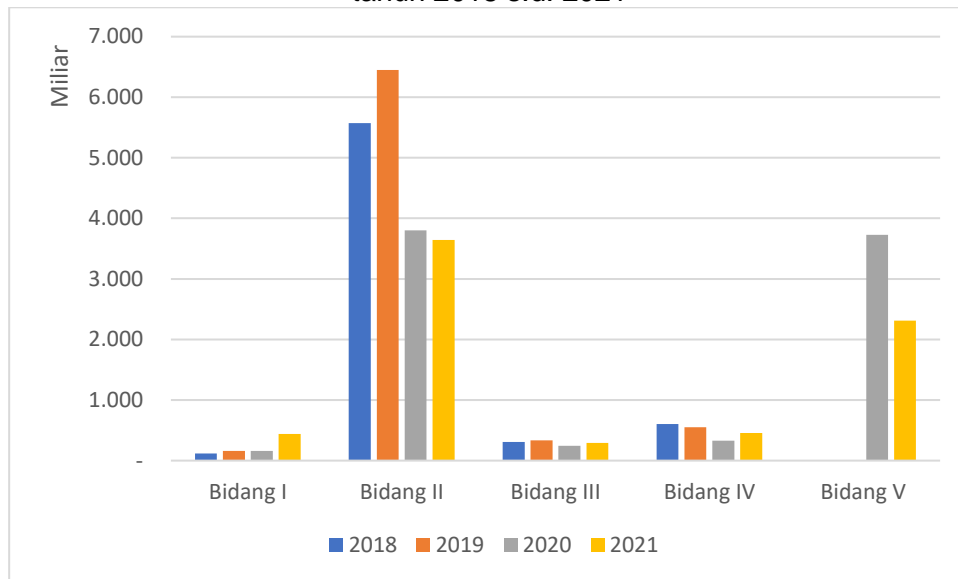
D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Data Penelitian

a. Penggunaan Dana Desa

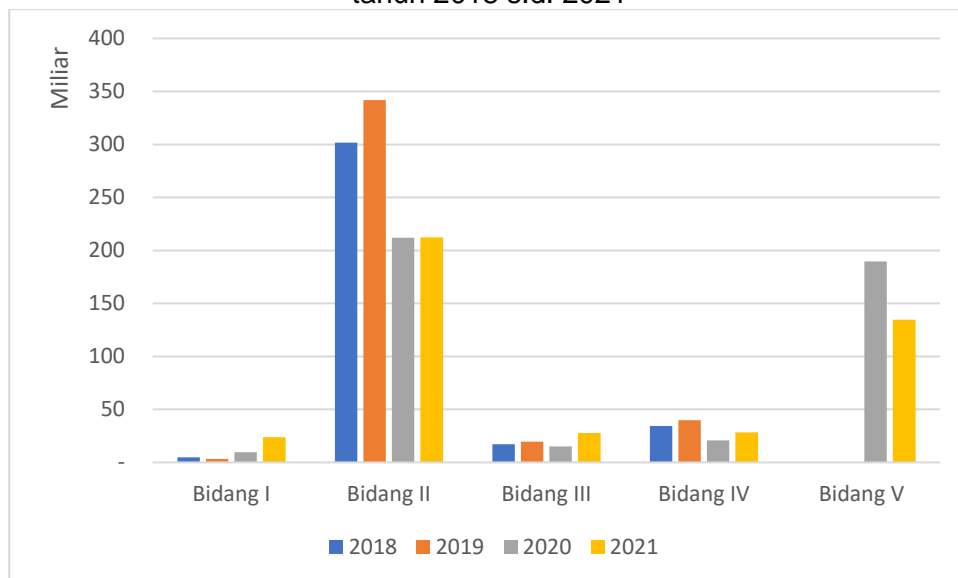
Sesuai dengan prioritas Penggunaan Dana Desa, Dana Desa dapat digunakan dalam 5 Bidang. Namun demikian, tampaknya baik desa di Provinsi Jawa Tengah maupun di Provinsi D.I. Yogyakarta lebih banyak menggunakan Dana Desa untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Hal ini dapat dilihat pada Grafik 2 dan Grafik 3. Pada tahun 2018 dan 2019, lebih dari 80 persen Dana Desa digunakan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Kemudian pada tahun 2020 dan tahun 2021, seiring dengan adanya pandemic COVID-19, penggunaan untuk Bidang ini menurun ke level 50 persen dan dialihkan ke Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Pengalihan penggunaan Dana Desa ini sejalan dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan dalam merespon pandemic COVID-19 dan mewajibkan desa untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakatnya.

Grafik 2
Penggunaan Dana Desa per Bidang di Provinsi Jawa Tengah
tahun 2018 s.d. 2021



Sumber : Aplikasi OmSPAN

Grafik 3
Penggunaan Dana Desa per Bidang di Provinsi D.I. Yogyakarta
tahun 2018 s.d. 2021



Sumber : Aplikasi OmSPAN

b. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Hanya saja, pada tahun 2020 terdapat beberapa Kabupaten yang mengalami sedikit penurunan dari tahun 2019. Di Provinsi Jawa Tengah, penurunan yang terjadi hanya berkisar diantara 0,01 - 0,12 dan terjadi di Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Wonosobo. Sementara itu, hanya

Kabupaten Sleman yang mengalami penurunan di Provinsi D.I. Yogyakarta yaitu sebesar 0,01.

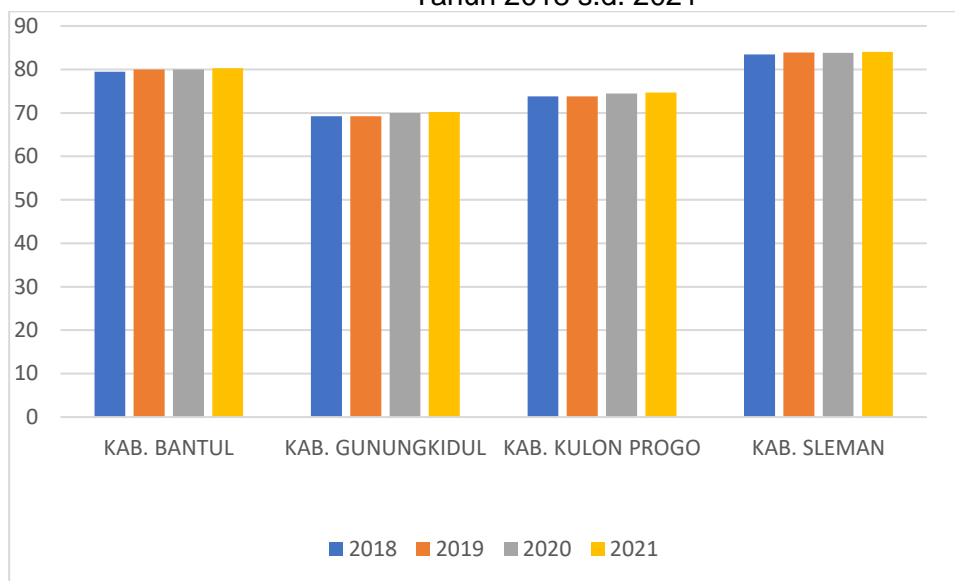
Dilihat dari IPM tertinggi dan terendah, Kabupaten Sukoharjo di Jawa Tengah mempunyai nilai IPM tertinggi yaitu sebesar 77,13, sementara Kabupaten Sleman di Provinsi D.I. Yogyakarta yang memiliki nilai 84,00 merupakan yang tertinggi di Provinsi D.I. Yogyakarta. Nilai IPM sebesar 66,32 di Kabupaten Brebes merupakan IPM terendah di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai IPM sebesar 70,16 merupakan yang terendah di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Tabel 1
Perkembangan Nilai IPM di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 - 2021

KABUPATEN	2018	2019	2020	2021
<i>KAB. BANJARNEGARA</i>	66,54	67,34	67,45	67,86
<i>KAB. BANYUMAS</i>	71,3	71,96	71,98	72,44
<i>KAB. BATANG</i>	67,86	68,42	68,65	68,92
<i>KAB. BLORA</i>	67,95	68,65	68,84	69,37
<i>KAB. BOYOLALI</i>	73,22	73,8	74,25	74,4
<i>KAB. BREBES</i>	65,68	66,12	66,11	66,32
<i>KAB. CILACAP</i>	69,56	69,98	69,95	70,42
<i>KAB. DEMAK</i>	71,26	71,87	72,22	72,57
<i>KAB. GROBOGAN</i>	69,32	69,86	69,87	70,41
<i>KAB. JEPARA</i>	71,38	71,88	71,99	72,36
<i>KAB. KARANGANYAR</i>	75,54	75,89	75,86	75,99
<i>KAB. KEBUMEN</i>	68,8	69,6	69,81	70,05
<i>KAB. KENDAL</i>	71,28	71,97	72,29	72,5
<i>KAB. KLATEN</i>	74,79	75,29	75,56	76,12
<i>KAB. KUDUS</i>	74,58	74,94	75	75,16
<i>KAB. MAGELANG</i>	69,11	69,87	69,87	70,12
<i>KAB. PATI</i>	70,71	71,35	71,77	72,28
<i>KAB. PEKALONGAN</i>	68,97	69,71	69,63	70,11
<i>KAB. PEMALANG</i>	65,67	66,32	66,32	66,56
<i>KAB. PURBALINGGA</i>	68,41	68,99	68,97	69,15
<i>KAB. PURWOREJO</i>	71,87	72,5	72,68	72,98
<i>KAB. REMBANG</i>	69,46	70,15	70,02	70,43
<i>KAB. SEMARANG</i>	73,61	74,14	74,1	74,24
<i>KAB. SRAGEN</i>	72,96	73,43	73,95	74,08
<i>KAB. SUKOHARJO</i>	76,07	76,84	76,98	77,13
<i>KAB. TEGAL</i>	67,33	68,24	68,39	68,79
<i>KAB. TEMANGGUNG</i>	68,83	69,56	69,57	69,88
<i>KAB. WONOGIRI</i>	69,37	69,68	70,25	70,49
<i>KAB. WONOSOBO</i>	67,81	68,27	68,22	68,43

Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 4
Perkembangan Nilai IPM di Provinsi D.I. Yogyakarta
Tahun 2018 s.d. 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik

2. Analisis Regresi Data Panel

a. Pengujian Kesesuaian Model

Pengujian kesesuaian model yang terbaik akan dipilih dengan menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman. Pengujian ini dilakukan agar hasil yang dikeluarkan dari pengolahan model dapat menggambarkan kondisi yang ada. Pertama, untuk menentukan pengujian dilakukan dengan menggunakan Pooled Least Square dan Fixed Effect Model digunakan Uji Chow dengan hasil seperti pada table di bawah

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	383.103264	(32,93)	0.0000
Cross-section Chi-square	645.347792	32	0.0000

Berdasarkan hasil dari uji chow tersebut menunjukkan bahwa nilai F-test dan Chi-square signifikan (nilai p-value 0,000 lebih kecil dari nilai alpha 0,05) sehingga model Fixed Effect yang lebih baik. Selanjutnya, perlu dilanjutkan dengan menggunakan Uji Hausman untuk pemilihan model menggunakan FEM atau REM.

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	34.952692	6	0.0000

Hasil dari uji Hausman tersebut menunjukkan bahwa nilai p-value 0,0000 lebih kecil dari nilai alpha 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini menggunakan *Fixed Effect Model*.

b. Hasil Analisis

Berdasarkan hasil estimasi model, Bidang I, Bidang II, Bidang III, Bidang IV, Bidang V dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM dapat tergambarkan pada hasil estimasi berikut:

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	71.11282	0.305048	233.1202	0.0000
BIDANG_I	3.61E-05	5.36E-06	6.736615	0.0000
BIDANG_II	1.53E-06	1.31E-06	1.171364	0.2444
BIDANG_III	1.15E-05	9.51E-06	1.212615	0.2283
BIDANG_IV	-1.27E-05	6.55E-06	-1.942566	0.0551
BIDANG_V	3.17E-06	1.20E-06	2.639560	0.0097
PERTUMBUHAN_EKONOMI	-0.008705	0.012764	-0.681966	0.4970
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.995299	Mean dependent var	71.63742	
Adjusted R-squared	0.993378	S.D. dependent var	3.805309	
S.E. of regression	0.309670	Akaike info criterion	0.734087	
Sum squared resid	8.918275	Schwarz criterion	1.585824	
Log likelihood	-9.449725	Hannan-Quinn criter.	1.080194	
F-statistic	518.1112	Durbin-Watson stat	2.557575	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan hasil di atas, maka persamaan yang dapat menggambarkan Bidang I, Bidang II, Bidang III, Bidang IV, Bidang V dan pertumbuhan ekonomi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$IPM_{it} = 71,11282 + 3,61E - 05 Bidang I_{it} + 1,53E - 06 Bidang II_{it} + 1,15E - 05 Bidang III_{it} - 1,27E - 05 Bidang IV_{it} + 3,17E - 06 Bidang V_{it} - 0,008705 Growth_{it}$$

Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran dalam regresi yang dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang diestimasi. Dari hasil regresi diatas diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,995299 atau sebesar 99,53%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yaitu Bidang I, Bidang II, Bidang III, Bidang IV, Bidang V dan pertumbuhan ekonomi menjelaskan besarnya pengaruh IPM di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2018-2021 sebesar 99,53%. Adapun sisanya sebesar 0,47% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk di penelitian ini.

Berdasarkan pengujian pengaruh secara simultan melalui pengujian F statistic, dapat disimpulkan bahwa variable bebas yang digunakan pada persamaan regresi data panel secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sementara itu, pengujian secara parsial menunjukkan bahwa dengan tingkat signifikansi lima persen, hanya Bidang I dan Bidang V memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sementara itu, Bidang II, Bidang III, Bidang IV dan pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai pengaruh secara statistik karena memiliki probabilitas lebih besar dari 5 persen.

Pengujian terhadap autokorelasi juga harus dilakukan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Menurut Ghazali (2013), autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test). Apabila nilai Durbin Watson mendekati nilai 2 maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut terbebas dari asumsi klasik autokorelasi. Karena nilai Durbin Watson dalam model ini memiliki nilai yang mendekati 2 maka dapat diartikan bahwa tidak ada masalah autokorelasi.

Pengaruh Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Variabel Bidang I memiliki pengaruh positif sesuai dengan hasil regresi berdasarkan nilai koefisien yang bernilai positif. Hal ini berarti bahwa ketika terjadi kenaikan realisasi pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Indeks Pembangunan Manusia juga akan mengalami peningkatan.

Pengaruh Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Variabel Bidang II memiliki pengaruh positif sesuai dengan hasil regresi berdasarkan nilai koefisien yang bernilai positif walaupun nilai probabilitasnya lebih dari 5 persen. Hal ini berarti bahwa ketika terjadi kenaikan realisasi pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa maka Indeks Pembangunan Manusia juga akan mengalami peningkatan.

Pengaruh Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Variabel Bidang III memiliki pengaruh positif sesuai dengan hasil regresi berdasarkan nilai koefisien yang bernilai positif walaupun nilai probabilitasnya lebih dari 5 persen. Hal ini berarti bahwa ketika terjadi kenaikan realisasi pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa maka Indeks Pembangunan Manusia juga akan mengalami peningkatan.

Pengaruh Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Variabel Bidang IV memiliki pengaruh negatif sesuai dengan hasil regresi berdasarkan nilai koefisien yang bernilai negatif walaupun nilai probabilitasnya lebih dari 5 persen.

Hal ini berarti bahwa ketika terjadi kenaikan realisasi pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa maka Indeks Pembangunan Manusia akan mengalami penurunan.

Pengaruh Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa

Variabel Bidang V memiliki pengaruh positif sesuai dengan hasil regresi berdasarkan nilai koefisien yang bernilai positif dan memiliki nilai probabilitas lebih dari 5 persen. Hal ini berarti bahwa ketika terjadi kenaikan realisasi pada Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa maka Indeks Pembangunan Manusia juga akan mengalami peningkatan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua penggunaan Dana Desa dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang dicerminkan melalui Indeks Pembangunan Manusia. Realisasi yang dilakukan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa mempunyai pengaruh positif dan secara statistik mempunyai pengaruh yang signifikan. Sementara itu realisasi yang dilakukan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa juga mempunyai pengaruh yang positif namun secara statistik tidak berpengaruh signifikan. Dalam penelitian ini, hanya Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mempunyai pengaruh negatif terhadap

Referensi:

Undang-Undang nomor 6 tahun 2004 Tentang Desa, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Jakarta: Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kompas.com (2018, 19 Juli). Kemiskinan di Desa Masih Tinggi: Efektivitas Dana Desa Dipertanyakan. diperoleh 9 Maret 2022, dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/19/134000026/kemiskinan-di-desa-masih-tinggi-efektivitas-dana-desa-dipertanyakan>

Detik.com (2017. 18 Oktober). Dana Desa Capai Puluhan Triliun, Sri Mulyani: Hasilnya Belum Maksimal. diperoleh 9 Maret 2022, dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3689926/dana-desa-capai-puluhan-triliun-sri-mulyani-hasilnya-belum-maksimal>

Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C., 2011, *Pembangunan Ekonomi:Edisi Kesembilan*, Jakarta:Erlangga.

Sigit, Tri Angga dan Kosasih, Ahmad, 2020, *Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Indonesia*, Indonesian Treasury Review Vol. 5 no.2.

Sunu, Made Krisna Kalpika dan Utama, Made Suyana, 2019, *Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali*, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 8.8

Manggala, Gallyn Ditya, 2019, *Pengaruh Dana Desa (DD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBSIS) Politeknik Praktisi Bandung Volume 1 Nomor 1

Simangunsong, Sixson Roberto, Tanjung, Ahmad Albar dan Siahaan, Sabda Dian Nurani, *Analisis Dampak Dana Desa dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tapanuli Tengah*, Journal of Business and Economic Research (JBE) Volume 2 nomor 1

UNDP. (1990). *Human Development Report 1990*. Concept and measurement of human development. <https://doi.org>